

PENGARUH DAMPAK TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP UMKM DI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN

Yudit Paulina¹, Mihel Tuatfaru², Luther Batkunde³
yuditbatmamolin@gmail.com¹, miheltuafaru@gmail.com², batkundeluther91@gmail.com³

Program Studi Manajemen
Universitas Lelemuku Saumlaki

ABSTRAK

Poverty is one of the standards of living or welfare standards of society in a region. A community is considered poor if its income is much lower than the average income, thus having few opportunities to improve its welfare. Poverty occurs because of the impacts that influence it, so that there is no community effort to escape the cycle of poverty they face. One of these is the MSME business actors in South Tanimbar. The purpose of this study was to determine the impact of the poverty level on MSMEs in South Tanimbar District. The research method used was a quantitative research method with data analysis using simple regression techniques. The sample in this study was 34 MSME business actors in South Tanimbar. Data collection was carried out using a questionnaire instrument developed from the variable (X) poverty level and the variable (Y) MSME. Based on the results of the study, it shows that the poverty level variable has an influence on the MSME variable in South Tanimbar District, this can be seen through the significance results, namely $0.004 < 0.05$, this shows that the results of the significance value are smaller than the predetermined significant value and can be seen from the t table and t count, namely t count is greater than t table ($3.079 > 2.042$) so it can be said that H_a is accepted and H_o is rejected. From the determination coefficient test, it shows that the poverty level has an effect of 22.9% on MSMEs and the rest is influenced by other variables not studied.

Keywords: Influence, Impact of Poverty Level, MSMEs.

PENDAHULUAN

Istilah pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Negara – Negara berkembang. Sebagai ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai *economic development is growth plus change*, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan –perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil (Malindar, B. (2020).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya dilihat dari pengeluaran perkapita, namun juga harus di pandang dari akses pendidikan, kualitas sumber daya, tempat tinggal, akses air bersih. Kemiskinan memiliki makna lebih luas yaitu tidak hanya sekedar kekurangan pendapatan atau konsumsi saja namun kemiskinan memiliki arti yang lebih mendalam yaitu dimana individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, akses air bersih serta sanitasi yang layak. Dengan demikian diperlukan kebijakan pemerintah yang multidimensi pula dalam menganggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah rendah artinya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut tinggi, begitu pula sebaliknya. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat akibatnya terdapat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Hal ini di sebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan daerah.

Gejala tersebut diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya. Kemiskinan terjadi karena tidak adanya usaha masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang dihadapinya. Salah satunya yaitu usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktifitas yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Dalam era globalisasi ini peningkatan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi internasional. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Keberadaan UMKM juga penting dalam sebuah negara (Yilmaz, 2020:29). UMKM memberikan kontribusi bagi negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi teknologi dan pendapatan ekonomi (Bonito dan Pais, 2020:34).

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi. UMKM juga dapat memberikan kontribusi yang besar pada penciptaan lapangan kerja (Chen, 2020:6). Maka itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan usaha yang banyak digeluti dan diminati oleh masyarakat untuk bertahan hidup dengan pendapatan yang di peroleh dan juga memperluas lapangan kerja yang ada. Menurut survei BPS tahun 2022 terhadap UMKM di indonesia menemukan kesulitan usaha yang di sebabkan dalam permodalan dan Sumber daya manusia adalah salah satu hambatan atau kelemahan yang di hadapi setiap UMKM. Harus di akui bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih belum maju dan berkembang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Tahun 2021-2023 jumlah pelaku UMKM di Tanimbar Selatan terus terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Koperasi, walaupun terjadi peningkatan di tahun 2023 namun tidak terlampaui besar mempengaruhi jumlah UMKM di

Tanimbar Selatan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah UMKM Di Tanimbar Selatan Kabupaten
Kepulauan *Tanimbar*

Tahun	Jumlah UMKN
2021	1028
2022	1577
2023	1291

Sumber: Dinas Koperasi KKT 2024

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2023 jumlah UMKM mengalami penurunan dapat di akibatkan dari kabupaten di tetapkan sebagai Kabupaten Miskim di propinsi Maluku, hal ini dapat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pertumbuhan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik, sektor kehutanan yang memberikan kontibusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat di sebabkan dari rendahnya harga komoniti kelapa, sementara dari sektor perikanan dan perkebunan juga tidak memberikan dampak pertumbuhan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hal ini di pengaruhi oleh faktor modal bagi masyarakat karena kondisi perekonomian sangat mengalami penurunan.

UMKM mengalami tantangan yang besar agar dapat keluar dari kemiskinan yang melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini, oleh karena itu maka sangat berpengaruh pada beberapa sektor yang menjadi roda perekonomian, salah satu dapat di lihat dari tingkat pendapatan masyarakat mulai menurun.

Persoalan yang kompleks yang di alami oleh para pelaku usaha adalah mereka tidak dapat mempertahankan usahanya ketika mengalami persaingan dengan yang lain atau mengalami permasalahan, tidak ada kegiatan usaha untuk keluar dari ketidaknyaman dalam berusaha, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat dampak dari kemiskinan yang terjadi saat ini yang sangat mempengaruhi seluruh sendi-sendi perekonomian yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini.

Tanimbar Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan *Tanimbar* yang juga di kenal oleh banyak orang dikarenakan di Tanimbar Selatan terdapat beberapa UMKM yang banyak di kenal oleh masyarakat setempat dan diluar kota Saumlaki. Namun masih terdapat permasalahan atas kondisi kemiskinan. Maka dari itu di era yang sudah modern ini penulis ingin membantu permasalahan UMKM yang ada di Tanimbar Selatan dengan menemukan apa dampak kemiskinan terhadap UMKM, dan apa yang menghambat kinerja usahanya, sehingga usahanya tidak mengalami perkembangan sehingga tetap mengalami kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana individu atau kelompok suatu rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, serta lingkungan yang tidak mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kemiskinan dapan di lihat dari dua sisi yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, dimana suatu individu atau kelompok rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi masih jauh lebih rendah dari masyarakat sekitar. Sedangkan kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang di ukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya,

((Cahyat, 2019:7).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika taraf hidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan atau sebagai garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Menurut sifatnya, kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Penduduk yang tergolong miskin sementara adalah mereka yang pengeluaran rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka menjadi miskin karena perekonomian secara umum memburuk sehingga pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimumnya. Kelompok penduduk ini akan tergolong tidak miskin jika kondisi perekonomian membaik karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memberikan kehidupan lebih baik (Adji. Dkk, 2020:14).

Menurut Arsyat, (2020:29) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa bebas.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, (Nursiah, dkk, 2019:2).

Kemiskinan merupakan kehilangan kesejahteraan (Suwarno & Bramantyo, 2021:45). Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (makanan, pakaian dan rumah). Adapun yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.

Menurut (Saputra, 2021:23), “kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimal dengan urutan prioritas yakni: cukup pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan rekreasi”.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik (Sholeh, 2019:1).

Kemiskinan menurut Suparlan yang dikutip oleh Abu Ahmadi bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ahmadi Abu, (2019:32). kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Mawardi, 2019:87).

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi yang dialami oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual (Irfan, 2017:68).

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan pokok minum diterjemakan sebagai

ukuran finansial dalam bentuk uang.

UMKM

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2018 tentang UMKM dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, (Undang- undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM).

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pelaku UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.150 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp.10 juta sampai dengan paling banyak Rp.20 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50 juta hingga maksimum Rp.70 juta.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.100 juta hingga paling banyak Rp. 200 juta hasil penjualan tahunan di atas Rp.1 milyar sampai paling tinggi Rp.2 milyar, (Tri Siwi Agustina, 2020:5).

UMKM adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, usaha inipun tidak selalu mendominasi pasar. UMKM bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain, yang menjalankan bisnis ini ialah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yang di teliti, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan harapan bahwa masalah yang diteliti dapat diketahui jawabannya. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner yang berupa lembaran pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang diolah menggunakan software SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji signifikan yang membandingkan nilai R_{hitung} dengan nilai R_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel atau responden. Jadi, dalam penelitian ini df = $34 - 2$ atau $df = 32$ dengan α 5% sehingga didapatkan hasil untuk $R_{tabel} = 0,349$.

Berikut ini adalah hasil yang diberikan kepada 34 responden dengan memberikan 8 pernyataan dalam 1 variabel bebas yaitu variabel tingkat kemiskinan (X) dan 9 pertanyaan dalam variabel terikat yaitu variabel UMKM (Y). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kemiskinan (X)	n 1	0,66	0,49	Valid
	n 2	0,02	0,49	Valid
	n 3	0,57	0,49	Valid
	n 4	0,15	0,49	Valid
	n 5	0,40	0,49	Valid
	n 6	0,02	0,49	Valid
	n 7	0,12	0,49	Valid
	n 8	0,84	0,49	Valid
UMKM (Y)	n 1	0,99	0,49	Valid
	n 2	0,12	0,49	Valid
	n 3	0,71	0,49	Valid
	n 4	0,88	0,49	Valid
	n 5	0,78	0,49	Tidak Valid
	n 6	0,52	0,49	Valid
	n 7	0,79	0,49	Valid
	n 8	0,72	0,49	Valid
	n 9	0,12	0,49	Valid

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel X (tingkat kemiskinan) memiliki R_{hitung} lebih besar di dibandingkan dengan R_{tabel} yaitu 0,349. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel X dinyatakan valid. Sedangkan untuk uji validitas variabel Y (UMKM), item pernyataan sebanyak 9 terdapat 1 item yang dinyatakan tidak valid karena memiliki R_{hitung} lebih kecil di dibandingkan dengan R_{tabel} yaitu 0,349. Item yang tidak valid itu adalah pernyataan nomor 5. Sehingga item pernyataan yang tidak valid akan dihapus dan tidak dipergunakan kembali dalam penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tujuan dilakukannya uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui hasil dari pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali terhadap gejala yang sama.. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	Item	Cronbach's alpha	Hasil Normal	Keterangan
	Tingkat kemiskinan (X)	8	0.926		Reliabel
	UMKM (Y)	8	0.924		Reliabel

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada tabel 3 diketahui bahwa variabel tingkat kemiskinan (X) dan variabel UMKM (Y) dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach' alpha* > 0,60. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pernyataan disetiap variabel dinyatakan reliabel (layak) karena memiliki nilai *cronbach' alpha* > 0,60.

3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji berapa besar pengaruh variabel bebas meliputi variabel kemiskinan terhadap variabel terikat yaitu UMKM dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: $Y = a + bX$.

Tabel 4
Hasil Perhitungan Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.014	3.305		2.727	0.010
	Total	0.473	0.154	0.478	3.079	0.004
a. Dependent Variable: Ytotal						

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2025

Hasil output pada tabel 4 di atas, maka dimasukkan dalam persamaan berikut ini: $Y = a + bX$.

$$Y = 9.014 + 0.473 + bX$$

1. Konstanta sebesar 9.014 persen memiliki pengertian bahwa jika variabel tingkat kemiskinan (X) nilainya adalah 0, maka UMKM (Y) sebesar 9.014 persen.
2. Koefisien variabel kemiskinan (X) yaitu sebesar 0,473 persen bernilai positif, maka apabila variabel tingkat kemiskinan naik 1 persen maka akan meningkatkan UMKM sebesar 47,3.

4. Pengujian Hipotesis

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai T_{tabel} sebesar 2,042 yang diperoleh dari $df = n - k = 34 - 2 = 32$ (dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara individual.
2. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.014	3.305		2.727	0.010
	Total	0.473	0.154	0.478	3.079	0.004
a. Dependent Variable: Ytotal						

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji T diperoleh nilai T_{hitung} tingkat kemiskinan (X) sebesar 3.079 yang lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,042 dengan nilai probabilitas signifikansi $0,004 < 0,05$. Maka dalam penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menguji seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	0.478 ^a	0.229	0.204	5.529
a. Predictors: (Constant), Total				

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2025

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,229, artinya adalah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada pelaku UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan sebesar 22,9% oleh faktor tingkat kemiskinan sedangkan sisanya adalah sebesar 77,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel tingkat kesiskinan (X) dan variabel Usaha Mikro Kecil, dan Menengah UMKM (X) dari hasil pengujiannya didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kesiskinan (X) berpengaruh terhadap UMKM (Y) artinya bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin baik kondisi UMKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha diterima dan terjadi pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan dan UMKM. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berperan secara signifikan serta berdampak positif pada UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat kemiskinan yang berdampak positif dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan berdampak positif dan berpengaruh sebesar 22,9% angka ini cukup berpengaruh karena tingkat kemiskinan begitu dominan dan berpengaruh bagi UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan.

Penelitian ini menemukan adanya korelasi positif antara tingkat kemiskinan dan UMKM. Maka adanya asumsi dari peneliti, hal ini mengindikasikan bahwa di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, UMKM cenderung lebih baik. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk peran UMKM sebagai sumber penghidupan utama di daerah miskin, dukungan pemerintah yang lebih besar untuk UMKM di wilayah tersebut, serta kreativitas dan ketahanan yang lebih tinggi dari pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa temuan ini tidak berarti bahwa kemiskinan adalah hal yang positif. Sebaliknya, temuan ini menyoroti pentingnya UMKM dalam ekonomi daerah miskin dan perlunya kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan UMKM, seperti akses ke modal, pelatihan, dan fasilitas akses pasar.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyanto (2022) yang mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. UMKM telah membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia (Data Bank Indonesia 2020). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan

salah satu aspek penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. (Gustarina Andini,dkk., 2022:2).

Untuk memperbaiki kondisi UMKM, diperlukan pengembangan kewirausahaan merupakan aktivitas yang mengaitkan inovatif, penilaian, serta eksploitasi kesempatan buat menghadirkan benda serta jasa baru, lewat organisasi, pasar, proses, dari bahan mentah yang sebelumnya tersedia sehingga menjadi ada (Heni Noviarita, 2021:302). Salah-satunya pelatihan merupakan proses sistematis yang dapat mengubah tingkah laku dan pola pikir para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Program pengentasan kemiskinan seharusnya diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM. Tanpa integrasi ini, pemberdayaan UMKM hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah saja, dan tidak akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerah. Di sisi lain, UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal. Kondisi ini sudah seharusnya dipandang sebagai salah satu indikasi perlunya pemberdayaan UMKM sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan (Gunawan, 2019:14).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa, hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti didapatkan bahwa variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap variabel UMKM di Kecamatan Tanimbar Selatan, hal ini dapat dilihat melalui hasil signifikansi yaitu $0,004 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditentukan dan dapat dilihat dari t tabel dan t hitung yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ($3,079 < 2,042$) maka dapat dikatakan H_a diterima dan H_o ditolak. Dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh sebesar 22,9% terhadap UMKM dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif berdasarkan kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat langsung dengan usaha pelaku UMKM, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambahkan faktor-faktor lain tingkat kemiskinan dalam UMKM.. Lebih lanjut, hal ini dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai sumber data dan titik acuan, sehingga penyelidikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh di masa mendatang dengan menggunakan data yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, (2019). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Chen, 2020. *More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World*. Review of Income and Wealth, 59(1), 1–28.
- Gustarina, dkk., (2022). *Strategi Digital Marketing: Studi UMKM Di Kota Metro*. Jurnal Distribusi., Vol. 10.
- Irfan Syaqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malindar, B. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki*, 2(1), 1-12.
- Mawardi (2019). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka setia.
- Noviarita Heni, dkk.. (2021). *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01).
- Saputra, (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 111–129.
- Sholeh, (2019). Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos,
- Suwarno & Bramantyo, R. Y. B. (2021). *Pemetaan Kemiskinan Dengan Pendekatan Lingkungan Sebagai Tahapan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Kediri*. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 10(1), 51–58.
- Yilmaz, (2020). *Employee Empowerment and on The Quality of Service Recovery Effort*. Journal of Quality Management. 2 (1).